

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barthwal, C.P., BL Sah. 2008. "Role of Governmental Agencies in Policy Implementation". *The Indian Journal of Political Science* 69, no. 3 (Juli-September): 457-472.
- Brynard, P.A. 2009. "Mapping The Factors That Influence Policy Implementation". *Journal of Public Administration* 44, no.3.1 (October): 557-577.
- Bungin, Burhan, ed. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Cahyaningrum. 2017. "Analisis Kesenjangan Implementasi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama". Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durrheim, D.M., William H.A, Barnes K, Spear R, dan Sharp B.L. 2003. "Beyond Evidence: A Retrospective Study of Factors Influencing A Malaria Treatment Policy Change in Two South African Province". *Critical Public Health* 13, no.4: 309-330.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Gani, Andi Arie Pangeran A. 2016. "Analisis Inventarisasi dan Penilaian Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia". Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Giacchino, S., dan Kakabadse A. 2003. "Successful Policy Implementation: The Route to Building Self Confident Government". *International Review of Administrative Sciences* 69, no.2: 139-160.
- Hadinata, Acep. 2011. *Bahan Ajar Manajemen Aset*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

- Indiahono, Dwiyanto. 2016. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gava Media.
- Jones-Webb, Rhonda, Toben Nelson, Patricia McKee, dan Traci Toomey. 2013. "An Implementation Model to Increase the Effectiveness of Alcohol Control Policies". *American Journal of Health Promotion* 28, no. 5 (Mei-Juni): 328-335.
- Keiser, Lael R. 2011. "The Impact of Bureaucratic Structure on Government Eligibility Decisions".
- Lasswell, Harold.D. 2007 "The Structure and Function of Communication in Society."
Iletişim ve Araştırma Dergisi (Journal of Communication and Research), no.24: 215-228.
- Luthfi, Rian Rosita. 2013. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara: Studi Kasus Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara". Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Matthews, C., Boon. H, Flisher A.J, dan Schaalma H.P. 2006. "Factors Associated with Teachers: Implementation of HIV/AIDS Education in Secondary School in Cape Town South Africa. *AIDS Care* 18, no.4: 388-397.
- Menzel, Donald C. 1987. "An Interorganizational Approach to Policy Implementation". *Public Administration Quarterly* 11, no. 1: 3-16.
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mulyana, Dedi. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nahdi, Muhammad. 2010. "Era Baru Pengelolaan Kekayaan Negara di Indonesia". *Media Kekayaan Negara* Edisi 02.
- Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan". *ComTech* 5, no.2 (Desember): 1110-1118.
- Paudel, Narendra Raj. 2009. "A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration". *Nepalese Journal of Public Policy and Governance* xxv, no. 2 (Desember): 36-54.
- Saleng, Abrar. 2000. "Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah Dalam Kontrak Karya Pertambangan". *Mimbar Hukum* X, no.36.
- Saleng, Abrar. 2000. "Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no.13 (April).

- Salvensen, David., Kelly R. Evenson, Daniel A. Rodriguez, dan Austin Brown. 2008. "Factors Influencing Implementation of Local Policies to Promote Physical Activity: A Case Study of Montgomery County, Maryland." *J Public Health Management Practice* 14, no.3: 280-288.
- Schneider, Barbara. 2002. "Clarity in Context : Rethinking Misunderstanding" . *Jurnal : Technical Communication* 49, No.2 (Mei): 210-218.
- Sidauruk, Paraden Lucas. 2013. "Peranan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)". *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 3, no.1 (September):
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syeirazi, M. Kholid. 2009. *Di Bawah Bendera Asing : Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.
- Wasito. 2015. "Analisis Yuridis Penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dan Penyajian dan Pengungkapannya dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia". Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Weaver, R. Kent. 2010. "But Will It Work?: Implementation Analysis to Improve Government Performance". *Governance Studies*, no. 32 (Februari).
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Witanto, D.Y. 2012. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual: Suatu Tinjauan terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. 15 Desember.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Presiden Republik Indonesia. 23 November.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. 28 April.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Presiden Republik Indonesia. 14 Januari.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 26 Oktober.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 16 Juli.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 14 Oktober.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Presiden Republik Indonesia. 20 Desember.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Presiden Republik Indonesia. 24 April.

Peraturan Presiden No.95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 13 November.

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 24 Agustus.

Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.06/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 7 September.

Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 6 November.

Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 24 Desember.

Peraturan Menteri Keuangan No. 266/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 31 Desember.

Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 21 Desember.

Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 23 Mei.

Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri ESDM. 16 Mei.

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM. 17 Februari.

Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM. 13 September.

Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.

BPK RI. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 - 2017.

Kementerian ESDM. Laporan Kegiatan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017.

Website :

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/1443/Dirjen-Kekayaan-Negara-Hadiri-Workshop-Pengelolaan-BMN-yang-Berasal-dari-KKKS.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/4031/Penyegaran-Pengelolaan-BMN-dari-KKKS.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/djkn-dan-ppbmn-gelar-focus-group-discussion-kupas-pengelolaan-bmn-eks-kkks-amp-pkp2b>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/12667/Rapat-Koordinasi-Pengelolaan-BMN-Hulu-Migas.html>

<http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/447>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15156/Aset-Hulu-Migas-Harus-Dikelola-dan-Dimanfaatkan-Secara-Optimal.html>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-bmn-hulu-migas-perlu-diperbaharui-secara-berkesinambungan/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/16423/Kemenkeu-ESDM-dan-SKK-Migas-Tandatangani-Nota-Kesepahaman-SOP-Percepatan-Pemindahtanganan-BMN-Eks-KKKS.html>

<http://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional> (diakses pada 2 Februari 2018, 20:31 WIB)